



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARIADI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FIK**
3. NHK : **735371**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.300.000.000**

1. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/198 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 281.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MANUAL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, MITTSUBHISI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT MANUAL Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 116.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 220.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.917.500.000**



III. HUTANG

Rp.

5.560.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.911.940.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.